

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia juga memiliki banyak tempat yang potensial untuk dijadikan objek wisata menarik, sehingga perlu melakukan pembangunan di sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata pada intinya merupakan suatu aktivitas yang menggali segala potensi pariwisata baik yang berasal dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya buatan manusia yang semuanya memerlukan penanganan secara menyeluruh. Masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di daerah pedesaan, dimana potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan keindahannya berada. Pembangunan sektor pariwisata di daerah pedesaan merupakan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat dan potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu, orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada pedesaan adalah suatu tindakan yang tepat dan sangat strategis, karena selain dapat mendatangkan sumber pendapatan daerah, meningkatkan devisa negara di sektor non migas, juga akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Prioritas pariwisata yang paling utama adalah pembangunan sumber daya manusia itu sendiri, terutama masyarakat lokal yang langsung berinteraksi dengan wisatawan agar dapat dicapai kesetaraan dan terjadinya saling pertukaran maupun kerjasama saling menghargai dan memperkaya kehidupan (Baiquni, 2010:15). Hal ini menandakan bahwa pariwisata hendaknya mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. pemerintah sangat diharapkan dapat memberi perhatian serius untuk sektor pariwisata dan terus menggalakkan kepariwisataan di berbagai daerah sesuai dengan karakter daerah masing-masing (Asyifa, 2016).

Pembangunan masyarakat pedesaan perlu ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berperan

serta. Dari semua ini masyarakat pedesaan makin mampu mengerahkan dan memanfaatkan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Desa wisata sebagai media dalam memberdayakan masyarakat yang akan diikuti oleh kelestarian dan keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat. Aktualisasi dari pemberdayaan masyarakat akan tercermin dari peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan obyek wisata, mulai dari perencanaan, pengelolaan, evaluasi, sampai pada menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Masyarakat akan belajar dalam mengelola potensi yang dimiliki terkait dengan potensi yang dapat dikembangkan sebagai potensi desa wisata.

Berdasarkan uraian di atas, ada gagasan untuk membangun desa wisata. Desa wisata dikembangkan sebagai upaya untuk membangun ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata di suatu wilayah yang dominan masyarakat sebagai tokoh utama pengembangannya. Desa wisata merupakan alternatif wisata budaya atau tradisi yang diharapkan berdampak terhadap pertumbuhan berbagai sektor kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, terutama peningkatan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dari kegiatan kunjungan wisata.

Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersama termasuk “membangun bersama masyarakat” sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada masyarakat setempat. Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat di antaranya, yaitu: (1) memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata, (2) meningkatkan peran masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata, (3) dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (Demartoto, 2009). Oleh karena itu salah satu pendekatan yang didapat digunakan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif.

Peran serta diartikan sebagai keterlibatan, tetapi aspek keterlibatan ini sering diartikan secara sempit. Suatu program dikatakan melibatkan masyarakat ketika masyarakat sudah diajak melaksanakan suatu program tertentu. Padahal

sebenarnya sebuah program dikatakan bersifat partisipatif apabila masyarakat sudah terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Masyarakat yang berada di sekitar obyek wisata Mangunan, dimana terdapat sembilan obyek wisata alam yang tersebar di Sembilan dusun, masyarakat mengaku belum sepenuhnya terlibat dalam pengembangan desa wisata atau kurang terlibat, seperti dalam proses perencanaan dan pengembangannya yang semestinya terjadi masyarakat harus dilibatkan secara penuh, apapun yang ingin diprogramkan oleh pengelola tempat pariwisata didiskusikan dengan masyarakat. Harapan masyarakat akan merasa memiliki program tersebut, dan turut membantu kelancaran program tersebut. Hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 19 ayat 2, bahwa setiap orang atau masyarakat dalam atau di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja atau buruh, dan pengelolaan. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Lokasi penelitian ini terletak di Desa mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul. Desa Mangunan terdiri dari enam pedukuhan dan memiliki potensi Desa wisata alam yang cukup banyak. Dengan adanya desa wisata tersebut apakah masyarakat bisa terbantu menyelesaikan permasalahan, terutama terkait dengan masalah ekonomi yang dimana sangat diharapkan dapat membantu masyarakat menuju masyarakat yang lebih maju baik secara pemikiran, ekonomi, dan tentunya kepedulian masyarakat sendiri dengan lingkungan terutama terhadap manusia dengan alamnya.

Desa wisata alam Mangunan diresmikan pada tahun 2015 oleh Sri Sultan Hamengkubawono X menjadi kawasan wisata hutan. Obyek wisata alam ini sangat terkenal dan menjadi salah satu ikon wisata baru di Kabupaten Bantul. Jumlah wisatawan yang datang di obyek wisata Mangunan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 230.004 orang. Selain jumlah wisatawan, kepopuleran obyek wisata Mangunan terlihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi

tiket masuk yang melebihi target pengelola yang dicanangkan 2 miliar dapat dicapai pada tahun 2018 dapat dicapai lebih dini di tahun 2018.

Peresmian obyek wisata alam Mangunan memberi dampak “*gethok tular*” di wilayah Kecamatan Dlingo. Hal ini terlihat dari banyaknya obyek wisata alam baru yang muncul seperti air terjun, perbukitan, *landscape* (tempat melihat bentang alam), dan hutan pinus. Tahun 2018, terdapat sembilan obyek wisata alam yang tersebar di desa Mangunan. Sebaran obyek wisata alam di Desa Mangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Obyek Wisata Alam Mangunan**

No	Nama Obyek Wisata	Desa	Lokasi
1	Taman Buah Mangunan	Mangunan	Dusun Mangunan
2	Seribu Batu Songgolangit	Mangunan	Dusun Sukarame
3	Jurang Tembelan	Mangunan	Dusun Kanigoro
4	Goa Gajah	Mangunan	Dusun Lemahbang
5	Tebing Watu Mabur	Mangunan	Dusun Lemahbang
6	Bukit Panguk Kediwung	Mangunan	Dusun Kediwung
7	Bukit Mojo	Mangunan	Dusun Kediwung
8	Tlaga Giri	Mangunan	Dusun Kediwung
9	Tebing Watu Lawang	Mangunan	Dusun Mangunan

Sumber: hasil survei Lapangan 2018

Tabel 1.1 menunjukkan terdapat sembilan obyek wisata di Mangunan. Salah satu obyek wisata yang paling banyak diserbu wisatawan lokal dan mancanegara adalah Seribu Batu Songgolangit yang terletak di Dusun Sukarame . Obyek wisata ini dianggap paling menarik, karena selain menawarkan keindahan hutan lindung sebagai sarana wisata, juga dilengkapi dengan spot-spot andalan berupa Rumah Hobbit. Berdasarkan wawancara dengan pengelola Desa wisata, selaku pengelola obyek wisata di Mangunan diketahui bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Mangunan pada saat libur panjang, ada sekitar 7.000 hingga 8.300 pengunjung perharinya, hari sebelumnya disetiap akhir pekan atau libur nasional, kunjungan wisatawan antara 4.000 hingga 5.000 perhari. Destinasi wisata yang menjadi primadona selain Seribu Batu Songgolangit, di antaranya adalah Pinus, Bukit Mojo, dan Bukit Panguk.

Ketika peneliti berkunjung ke Desa Mangunan, tampak jelas bahwa pembangunan dan pengembangan desa wisata ini melibatkan banyak peran serta masyarakat, mulai dari unsur pemerintah desa, pengelola desa wisata, orangtua,

pemuda, dan tokoh masyarakat. Peran serta masyarakat nampak dari mulai gotong royong, sampai membangun fasilitas pendukung desa wisata. Berdasarkan potensi serta berbagai aktivitas peran serta dan pengembangan desa wisata Mangunan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Mangunan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. apa saja bentuk peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata Mangunan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul?,
2. bagaimana tingkat peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata Mangunan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul?, dan
3. apa saja manfaat peran serta serta dalam pengembangan desa wisata Mangunan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. menganalisis bentuk peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata Mangunan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul,
2. menganalisis tingkat peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata Mangunan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, dan
3. menganalisis manfaat peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata Mangunan di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam suatu program

pemberdayaan, khususnya bagi Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, program pemberdayaan yang berbasis masyarakat, dan bagi masyarakat sendiri dapat sebagai referensi untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah serta mengawal program-program pemerintah.

## 1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

### 1.5.1 Telaah Pustaka

#### 1.5.1.1 Peran Serta Masyarakat

##### 1.5.1.1.1 Pengertian Peran Serta Masyarakat

Peran serta secara etimologis berarti partisipasi, sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pariwisata sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Menurut Davis dalam Rivai (2000:61), partisipasi adalah keterlibatan mental, pikiran dan emosi (perasaan) seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan bersama-sama dengan kelompok lainnya, artinya ikut serta dalam kegiatan, ikut serta dalam memanfaatkan hasil dan menikmati hasil pembangunan yang nyata. (Sumarto, 1994:113).

Peran serta masyarakat lokal digambarkan sebagai memberi lebih banyak peluang kepada orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal itu berarti memberi wewenang atau kekuasaan pada orang untuk memobilisasi kemampuan mereka sendiri, menjadi pemeran sosial dan bukan subjek pasif, mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupannya (Cernea,

1991. dalam Brandon, 1995:161). Pendekatan peran serta melibatkan orang di dalam proses pengembangan dirinya. Peran serta masyarakat dipandang sekedar pembagian manfaat sosial dan ekonomi. Proses peran serta membantu orang untuk memiliki pengawasan cukup terhadap kehidupan mereka sendiri. contoh, suatu proyek pariwisata alam bisa menciptakan kesempatan kerja yang cukup besar bagi orang-orang lokal diberbagai pekerjaan, mulai dari pemandu, dan penjaga sampai ke penjual makanan dan barang kerajinan. Pekerjaan-pekerjaan ini bisa menyediakan manfaat lokal yang penting, tetapi orang-orang lokal tidak mesti berperan serta dalam pengambilan keputusan.

Pariwisata yang dikelola oleh masyarakat bermaksud membuat masyarakat memutuskan tipe pertumbuhan yang ingin mereka lihat dan kemudian menolong masyarakat mengimplementasikan rencananya (Brandon, 1995:160). Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan praktek-praktek yang merusak sumber daya tanpa perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Perubahan terbaik dapat terjadi apabila masyarakat dapat melaksanakan kontrol terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. konteks pariwisata tidak adanya keterlibatan berarti bahwa pariwisata lebih memiliki dampak negatif baik sosial maupun ekonomi. Menurut Cemea dalam Brandon (1995:160), cukup terdapat bukti bahwa kegiatan yang lebih memfokuskan pada manfaat ekonomi tanpa secara efektif mendorong peran serta masyarakat lokal dalam identifikasi, perancangan, implementasi, atau evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan kurang menyediakan manfaat menyeluruh bagi masyarakat.

#### 1.5.1.1.2 Pola Partisipasi

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu konsultatif dan kemitraan. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendekatan ini meskipun masyarakat yang berkepentingan memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberi tahu akan tetapi semua keputusan berada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat bukan sebuah faktor penentu dalam pengambilan keputusan, selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik. Pola partisipasi

masyarakat yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan, karena diposisikan sebagai mitra kedua kelompok yang berbeda tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Demikian keputusan bukan berada di pihak masyarakat ataupun pengusaha, tetapi bersama-sama masyarakat. adanya konsep ini, maka ada upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan (Suarthana, 2015).

Kedua kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka. Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan kelompok kepentingan untuk berperan sertadidalamnya, dapat mengantarkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap satu sama lain. demikian perpedaan kepentingan dapat dijumpatani.

#### 1.5.1.1.3 Syarat Tumbuhnya Partisipasi

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok berikut ini.

##### 1. adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi

Banyak terdapat program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Ada beberapa kesempatan yang dimaksud di sini, di antaranya berikut ini.

- a. kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi tingkat paling bawah,
- b. kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan,
- c. kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.

2. kemampuan untuk berpartisipasi ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan berpartisipasi itu di antaranya berikut ini.
  - a. kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun atau memperbaiki mutu hidupnya,
  - b. kemampuan untuk melaksanakan pembanguana yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki,
  - c. kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.
3. kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya. Sikap-sikap itu di antanya berikut ini.
  - a. sikap-sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan,
  - b. sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya,
  - c. sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri,
  - d. sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan,
  - e. sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya (Mardikanto dan Soebiato, 2013:91).

Partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting. Dimensi yang pertama adalah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Berdasarkan latar belakangnya dan tanggungjawabnya masyarakat diklarifikasikan sebagai berikut: (1) penduduk setempat, (2) pemimpin masyarakat, (3) pegawai pemerintahan, dan (4) pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu. Semua pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan suatu program harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka. Dimensi yang kedua,

bagaimana partisipasi itu berlangsung. penting karena untuk mengetahui hal-hal seperti: (1) apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat setempat, (2) apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan, (3) saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam beres individu atau kolektif, dalam organisasi formal ataukah informal, dan apakah partisipasi itu secara langsung atau melibatkan wakil, (4) durasi partisipasi, (5) ruang lingkup partisipasi, apakah sekali atau seluruhnya, sementara atau berlanjut dan meluas, dan (6) memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan (Dwiningrum, 2011:59).

Pemahaman kedua dimensi terhadap kelangsungan partisipasi diatas terwujud dari suatu dinamika dan akibat dari partisipasi. Jika diterapkan dengan tepat maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tentang “siapa” yang berpartisipasi dalam aktivitas “apa” yang dipertimbangkan dalam partisipasi.

#### 1.5.1.1.4 Bentuk-bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi dibagi enam bentuk berikut ini.

1. partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial,
2. partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya,
3. partisipasi dalam perencanaan, termasuk pembangunan, dan pengambilan keputusan,
4. partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan,
5. partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan,
6. partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Ndraha, 1990:103).

Terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta

benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud), misalnya uang, harta benda, dan keterampilan. kedua adalah bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak), yaitu berupa partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial dan partisipasi representatif (Firmansyah, 2018).

#### 1.5.1.1.5 Tahap-tahap Partisipasi

Terdapat empat tahap dalam partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan sehingga partisipasi masyarakat haruslah melalui empat tahap tersebut agar tujuan dari sebuah program dapat terlaksana (Dwiningrum, 2011:62).

#### 1.5.1.1.6 Tujuan Partisipasi

Menurut Henry Sanoff mengatakan bahwa tujuan utama dari partisipasi masyarakat adalah:

1. melibatkan masyarakat dalam mendisain proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya meningkatkan kepercayaan mereka, dan
2. menyalurkan dan memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan mutu atau kualitas dari perencanaan keputusannya, meningkatkan rasa kebersamaan (*sense of community*) dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (Tantan, 2008:48).

Partisipasi tentunya memiliki berbagai tujuan agar apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan sesuai dengan arah tujuannya,

sebab partisipasi adalah suatu proses suksesnya suatu program yang dijalankan

#### 1.5.1.1.7 Manfaat Partisipasi

Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respon masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa, dan diterima oleh masyarakat yang mampu mensinergikan tradisi sosial budaya dengan proses manajemen modern.

Perencanaan secara partisipatif diperlukan karena memberikan manfaat sekurang-kurangnya, yaitu:

1. anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang atau sektor yang perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian diketahui arah masa depan mereka,
2. anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar,
3. masyarakat dapat menghimpun sumberdaya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat (Adisasmita, 2006:40-41).

Adapula manfaat partisipasi yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yang negatif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan,
2. masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup,
3. masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena

dampak,

4. pemerintah mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat yang belum atau tidak ada dalam laporan andal, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yang diambil akan lebih tepat karena di dalam informasi tersebut pemerintah sering menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat yang belum terekam dalam laporan secara jelas terutama hal-hal yang tidak dapat dikuantitatifkan,
5. apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenai proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal apa yang diperlukan, sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari,
6. masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin manfaat tersebut (dampak positif) dan ikut menekan atau menghindarkan diri terkena dampak negatif,
7. dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak penyusunan Andal, biasanya perhatian dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pemrakarsa proyek pada masyarakat akan meningkat (Fahrudin, 2010:42).

#### 1.5.1.1.8 Prinsip-prinsip Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip partisipasi penting diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, agar seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan dapat berkontribusi dan memiliki tanggungjawab bersama untuk mensukseskannya. Tahapan partisipasi dapat dimulai dari tahap menentukan mana yang akan dituju dan apa yang akan dihasilkan, biasanya yang disebut dengan tahapan rancangan kebijakan dan rencana. Selanjutnya diikuti dengan partisipasi pada tahap menentukan cara untuk mencapai tujuan dan mempertaruhkan sumber daya agar tujuan dapat dicapai. Partisipasi dapat dilakukan mulai dari tahap implementasi sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi (Hetifah, 2010:187). Program pemberdayaan masyarakat itu akan sukses dalam memandirikan masyarakat disegala bidangnya bila didukung oleh partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini merupakan

factor esensial dalam mendorong dan Bergeraknya peran masyarakat tersebut. Partisipasi akan terwujud menjadi baik bila masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program tersebut memiliki peran dan kewenangan yang lebih baik (Tantan, 2008:65).

1. Tahap perencanaan, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program pengembangan program pembangunan. masyarakat, indikatornya dapat dilihat pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam musyawarah penentuan program, identifikasi dan masalah, ataupun pembuatan formula kegiatan atau program kemasyarakatan tersebut.
2. Tahap pelaksanaan, partisipasi pada tahap ini, anggota masyarakat adalah ikut serta dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan diikuti secara seksama dan cermat. Warga masyarakat aktif sebagai pelaksana maupun pemanfaatan program, masyarakat sebagai pelaksana, mereka misalnya berpartisipasi dalam perumusan prosedur, aturan main, dan mekanisme pelaksanaan program serta aktif dalam pelaksanaan itu sendiri. Masyarakat sebagai pemanfaat program, mereka bertanggung jawab penuh terhadap program yang diberikan oleh lembaga pemerintah/LSM/dunia usaha bagi kemanfaatan dan kemandiriannya. Mereka betul-betul melaksanakan program untuk memberdayakan dirinya dalam aspek lebih luas.
3. Tahap pelembagaan program, partisipasi pada tahap ini, anggota masyarakat ikut serta merumuskan keberlanjutan atau pelembagaan program. Langkah partisipasinya, masyarakat ikut serta dalam merumuskan dan membuat model-model pendanaan program, penguatan lembaga-lembaga pengelolaan program dan melakukan pengkaderan anggota masyarakat sebagai penguatan SDM bagi program tersebut.
4. Tahap monitoring dan evaluasi, pada tahap ini, masyarakat ikut serta mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan ini menjadi penting agar program pemberdayaan tersebut dapat dimiliki kinerja yang baik secara administratif maupun substantif (Tantan, 2008:66-70).

#### 1.5.1.1.9 Faktor-faktor Pendukung Partisipasi

Faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dapat didekati melalui berbagai disiplin keilmuan di antaranya yaitu: (1) dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar belakangnya, yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan yang dirasakan, (2) menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan, dalam hal ini respon merupakan fungsi dari manfaat atau *reward* yang dapat diharapkan, dan (3) harapan dalam konsep ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh. Manfaat itu sendiri dapat dibedakan dalam manfaat ekonomi maupun manfaat non ekonomi (yang dapat dibedakan dalam kekuasaan, persahabatan/kebersamaan, dan prestasi (Mardikanto dan Soebiato, 2013:91).

Berdasarkan hasil penelitian di Jamaika, bahwa masyarakat tergerak untuk ikut berpartisipasi jika:

1. partisipasi itu dilakukukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan,
2. partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan,
3. manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat,
4. dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang atau berperan dalam pengambilan keputusan (Ndraha, 1990:105).

#### 1.5.1.1.10 Faktor-faktor Penghambat Partisipasi

Rendahnya partisipasi masyarakat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurdjati, yaitu disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, seperti kesempatan untuk mendapatkan informasi dan rendahnya pendidikan. Keterbatasan yang dimaksud dapat berupa materi, tenaga, pengetahuan, kesadaran dan lain-lain. Hambatan partisipasi masyarakat terletak pada kesiapan mereka untuk melakukan partisipasi sepenuhnya. Penyebabnya adalah : (1) kemiskinan atau keterbatasan waktu dan tenaga untuk menghadiri pertemuan serta

memperhatikan lingkungan, (2) tingkat pendidikan kurangnya pengetahuan guna melestarikan kawasan cagar budaya, dan (3) lemahnya rasa kebersamaan atau solidaritas khususnya bagi mereka yang baru tinggal di tempat baru. Tidak adanya antusiasme terhadap partisipasi masyarakat karena adanya pengalaman-pengalaman mengecewakan di masa lalu. Terdapat perbedaan kepentingan. Tidak adanya kesadaran bahwa masyarakat dan individu mempunyai hak-hak untuk berpartisipasi. Minimnya transparansi (Nurdjati, 1996:62).

#### 1.5.1.2 Pengembang Desa Wisata

##### 1.5.1.2.1 Pengertian Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kerja “berkembang” yang berarti : a) mekar terbuka, b) menjadikan besar (luas, merata), c) menjadikan maju (baik, sempurna) (Pusat Bahasa Depdiknas, 2005:538). Pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pengembangan desa wisata bisa diartikan sebagai kegiatan menjadikan maju sebuah desa wisata. Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian mewarnai sebuah kawasan desa wisata, di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata (<http://www.central-java-tourism.com>, diakses 5 Agustus 2018).

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan unsur-unsur yang memiliki atribut produksi wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan secara keseluruhan suasana yang memiliki tema dengan mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial budaya dan ekonominya, serta adat istiadat keseharian yang

memiliki ciri khas arsitektur dan tata ruang desa menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata (Ditjen Pariwisata, 1999).

Sesuatu yang dikembangkan tentunya mempunyai tujuan tertentu, seperti pengembangan desa wisata mempunyai beberapa tujuan diantaranya berikut ini.

1. desa wisata merupakan obyek wisata alternatif sebagai bentuk dukungan program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan,
2. menggali potensi desa dengan mengangkat budaya lokal dalam rangka pembangunan masyarakat,
3. memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat sekitar, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa,
4. mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar gemar pergi ke desa untuk berekreasi,
5. menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa, sehingga tetap tinggal di desanya tersebut,
6. mempercepat proses adaptasi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang (Safitri dan Yusman, 2018).

Prinsip dasar dari pengembangan desa wisata:

1. pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa,
2. fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki,
3. pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu “sifat” budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau “sifat” atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015).

Terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata, yaitu:

1. akomodasi, yaitu sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk,
2. atraksi, yaitu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai

partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki>, diakses 5 Agustus 2018).

Ada beberapa kriteria terkait desa wisata antara lain:

1. atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup kondisi alam, seni dan budaya komunitas setempat, kegiatan produksi; seperti kerajinan batik, kerajinan perak, dan atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik, unik, dan atraktif di desa tersebut,
2. jarak tempuh, adalah jarak tempuh dari desa wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibu kota propinsi dan jarak dari ibu kota kabupaten/kota. Besaran atau luasan desa atau desain yang mencakup masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa, kriteria berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa,
3. sistem kepercayaan dan sosial, merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada sebuah komunitas di desa,
4. ketersediaan infrastruktur yang meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon, dan sebagainya (Kuncoroyekti, 2018).

#### 1.5.1.2.2 Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata

Pariwisata bagaimanapun juga memiliki andil dan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil di pedesaan di mana proyek desa wisata dikembangkan. Kita ketahui bahwa pariwisata sebagai suatu industri mencakup aspek-aspek yang amat luas dan menyangkut berbagai kegiatan ekonomi masyarakat (Yoeti, 2008:18). Mengembangkan pariwisata yaitu sebagai suatu industri akan terjadi peningkatan dalam kesempatan berusaha, kesempatan kerja, penerimaan pajak, pendapatan nasional, dan sekaligus akan memperkuat posisi neraca pembayaran (Yoeti, 2008:19).

Proses mengembangkan pariwisata terutama desa wisata tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat secara langsung sebagai modal dasar dalam mensejahterakan masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat proses pengembangan akan berdampak baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Modal dasar tersebut apabila dikelola dan direncanakan dengan baik dan terarah akan

mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pencapaian tujuan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Sedarmayanti, 2014:24).

Partisipasi masyarakat akan selalu ada dampak yang terjadi di sekitar lingkungan tersebut. Beberapa dampak partisipasi bagi masyarakat, antara lain:

1. dampak sosial budaya ditimbulkan oleh aktivitas kepariwisataan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dampak sosial budaya mengacu pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa yang membuka diri sebagai desa wisata. Dampak sosial budaya tidak selamanya berarti negatif, tetapi bisa juga sebaliknya. Idealnya, kehadiran aktivitas wisata di sebuah desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat untuk melestarikan sistem nilai budaya dan keseniannya. Pengelolaan desa wisata yang didasarkan pada partisipasi masyarakat desa setempat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang mencakup peningkatan efisiensi dan produktivitas dapat meningkatkan pemerataan hasil dan kesejahteraan mereka,
2. dampak ekonomi merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Aktivitas wisata tidak saja membuka peluang bagi warga desa yang dikunjungi untuk menawarkan jasa wisata yang bisa ditukar dengan uang, tetapi juga menjadi lokomotif ekonomi desa. Semakin banyak orang datang berkunjung ke suatu desa, semakin bertambah barang yang dibutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun untuk kebutuhan konsumsi. Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari wisatawan dan mancanegara yang mengunjungi desa wisata akan memberikan dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat lokal. Hal ini bias dilihat dalam perubahan fisik bangunan yang semakin bagus, fasilitas yang semakin lengkap, transportasi yang semakin layak.

### 1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung pembahasan dan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa pustaka ataupun karya-karya yang bersangkutan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang partisipasi masyarakat yang relevan dengan topik penulisan karya ilmiah ini sebagai perbandingan maupun rujukan, antara lain sebagai berikut.

1. Eva Kurniawati (2017), “Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu”. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui kegiatan atraksi wisata di desa wisata Tulungrejo, dan (2) mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Desa Wisata Tulungrejo terhadap perencanaan dan pengembangan.
2. Winda Aryani Asyifa (2015), “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Alamendah dan mengetahui apakah ada hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengembangan Desa Alamendah.
3. Suranti (2013), “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pantai Baru Dusun Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pengelolaan dan bentuk kegiatan partisipasi serta dampak sosial, ekonomi, bagi masyarakat.

Ketiga penelitian di atas secara garis besar fokusnya adalah partisipasi masyarakat, akan tetapi lokasi berbeda dan permasalahan yang diangkat tidak semuanya sama persis sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian “Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Mangunan di Kecamatan Dlingu” masih layak diteliti dengan mengkaji ulang permasalahan yang sudah ada dengan lokasi yang berbeda. Penelitian ini lebih difokuskan kepada bentuk-bentuk peran serta, tingkat peran serta, dan manfaat peran serta masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Mangunan.

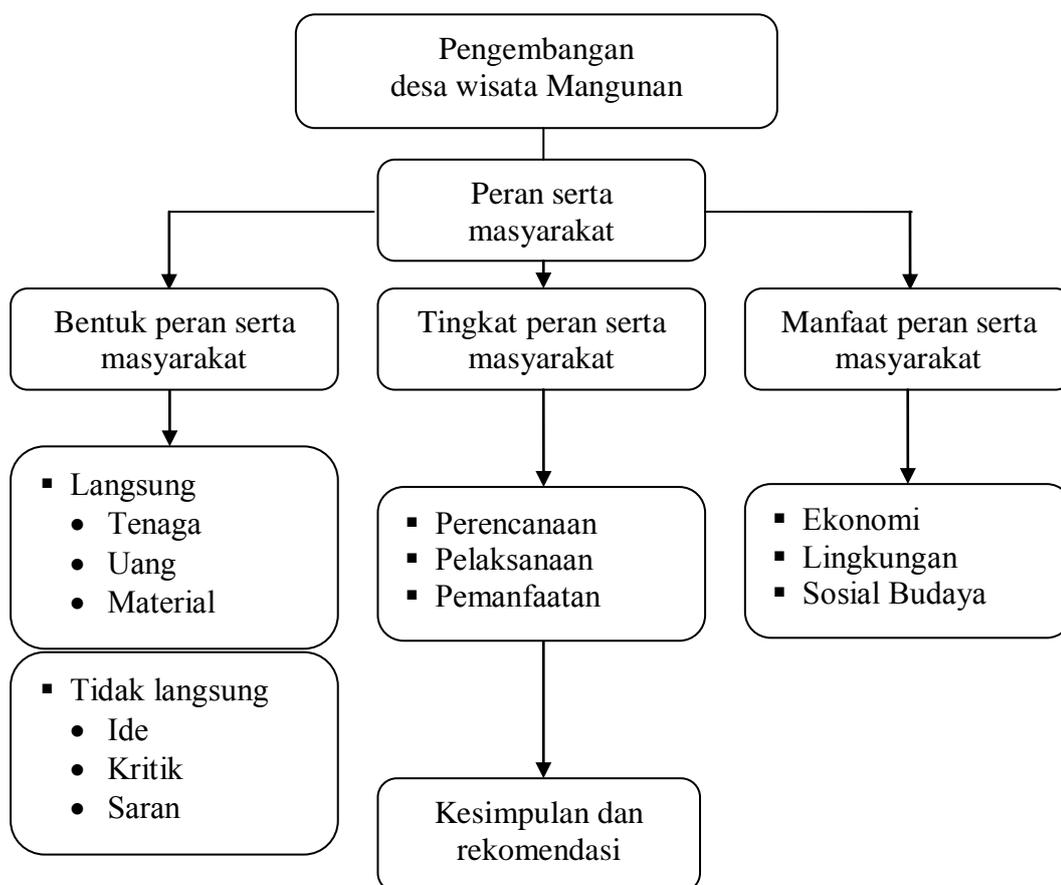
## 1.6 Kerangka Penelitian

Pariwisata menjadi salah satu hal yang sangat berpotensi untuk di kembangkan dalam suatu daerah, karena dalam pariwisata dapat memberikan nilai lebih, seperti menambah pendapatan daerah, menumbuhkan nilai sosial ekonomi bagi masyarakat setempat.

Masyarakat tidak lepas dari pengembangan pariwisata karena masyarakat juga menjadi bagian utama dalam berkembangnya pariwisata dalam suatu wilayah, terutama berada di wilayah pedesaan. Peran serta masyarakat yang berada di desa wisata sangat diperlukan guna memperlancar pengembangan desa wisata di daerah tersebut.

Acuan dalam penelitian ini untuk lebih dalam meneliti bentuk, tahap-tahap, dan manfaat peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata alam yang ada di Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul:

Kerangka penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 1.1 penelitian berikut ini.



**Gambar 1.1 Kerangka Penelitian**

### 1.7 Batasan Operasional

Upaya peneliti agar penelitian ini tidak meluas, dipandang perlu menguraikan istilah-istilah dengan membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada:

1. analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan dan perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya (sebab-musabab dan akibat perkaranya) (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000:32).
2. peran serta secara harfiah berarti partisipasi (*participation*). Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan (Solekhan, 2014:141). Sedangkan menurut Nasution (2009:16), “Partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.”
3. masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suharto, 2010:47).

Berdasarkan definisi di atas peneliti mengartikan penyelidikan peran serta masyarakat sebagai keterlibatan sekelompok orang dalam suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

1. Pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kerja “berkembang” yang berarti: a) mekar terbuka, b) menjadikan besar (luas, merata), c) menjadikan maju (baik, sempurna) (Pusat Bahasa Depdiknas, 2005:538).
2. Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan social udaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya (Saktiawan, 2018). Selanjutnya desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (<https://id.m.wikipedia.org/wiki>, diakses 5 Agustus 2018). Arti dari pengembangan desa wisata menurut peneliti yaitu usaha bersama masyarakat setempat dalam mengembangkan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada menjadi desa wisata yang lebih maju, lebih baik, dan lebih berkualitas.